

ABSTRAK

Alfithra Muhammad Taftazani: Dinamika Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Belanda pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949

Penelitian ini mengkaji dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda selama periode Revolusi Fisik (1945-1949), sebuah era yang ditandai oleh perpaduan antara perundingan intens dan konfrontasi militer. Rumusan masalah adalah Kondisi Sosial Politik Indonesia pasca Kemerdekaan 1945 dan Respon Belanda Terhadap Kemerdekaan Indonesia, Serta Dinamika Diplomatik Indonesia dengan Belanda pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara umum Kondisi Sosial Politik Indonesia pasca Kemerdekaan 1945 dan Respon Belanda Terhadap Kemerdekaan Indonesia. Lebih khususnya untuk mengetahui tentang Dinamika Diplomatik Indonesia dengan Belanda pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yang mencakup empat tahapan utama: heuristik (pengumpulan sumber), kritik (analisis keaslian dan kredibilitas sumber), interpretasi (penafsiran makna), dan historiografi (penulisan sejarah).

Dinamika hubungan ini berjalan dalam sebuah siklus yang berulang: diplomasi yang menghasilkan kesepakatan, diikuti oleh pelanggaran dan agresi militer oleh pihak Belanda. Perjanjian Linggarjati (1947), yang memberikan pengakuan *de facto* kepada Republik Indonesia atas Jawa, Sumatra, dan Madura, secara sepihak dilanggar oleh Belanda melalui Agresi Militer I. Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian memfasilitasi Perjanjian Renville (1948), yang hasilnya justru sangat merugikan posisi Indonesia dengan menyempitnya wilayah kedaulatan secara drastis. Perjanjian ini pun kembali dilanggar oleh Belanda melalui Agresi Militer II, di mana ibu kota sementara Yogyakarta diduduki dan para pemimpin nasional ditawan. Titik balik krusial terjadi akibat Agresi Militer II, yang memicu kecaman keras dari dunia internasional, terutama dari PBB dan Amerika Serikat. Tekanan politik dan ancaman penghentian bantuan ekonomi (Marshall Plan) dari Amerika Serikat memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Proses ini memuncak pada Perjanjian Roem-Roijen (1949) yang membuka jalan bagi Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Melalui KMB, Belanda akhirnya secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Dengan demikian, diplomasi Indonesia dalam periode ini merupakan perpaduan kompleks antara perjuangan di meja perundingan dan medan pertempuran, di mana intervensi internasional memainkan peran kunci sebagai penentu hasil akhir.